



Tantangan Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Digital

Afra Mudrikah^{1*}, Eka Fajri Jayanti², Tasya Chika Setiaulia³, Teuku Aditya Rian Syaputra⁴, Hamdi Abdullah Hasibuan⁵

¹⁻⁵Universitas Riau, Indonesia

afra.mudrikah4124@student.unri.ac.id^{1*}, eka.fajri5792@student.unri.ac.id²,

tasya.chika6049@student.unri.ac.id³, teuku.aditya5140@student.unri.ac.id⁴,

hamdi.abdullah@lecturer.unri.ac.id⁵

Alamat: Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru 28293 – Indonesia

Korespondensi Penulis: afra.mudrikah4124@student.unri.ac.id*

Abstract. *This article aims to discuss the challenges of democracy in the digital era. Pancasila democracy is defined as a democratic system based on the values contained in Pancasila, using law to govern a democratic state. The legal regulations established to govern the state must align with the goals and worldview of the nation so that an effective and contextually appropriate democratic system can be properly implemented. The method used in this research is qualitative research with a case study approach, examining various sources such as scholarly journals, books, and articles related to the challenges of Pancasila democracy in the digital era. The research findings indicate that Pancasila democracy faces challenges in the digital era, and solutions are necessary to address these challenges. This article also discusses the role of education in strengthening Pancasila democracy in the digital era.*

Keywords: *Pancasila Democracy, Digital, Education*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang tantangan demokrasi di era digital. Demokrasi Pancasila diartikan sebagai sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan menggunakan hukum untuk mengatur negara yang berdemokrasi. Aturan hukum yang dibuat dalam mengatur negara harus sesuai dan sejalan dengan tujuan serta pandangan hidup bangsa sehingga sistem demokrasi yang baik dan sesuai dengan konteks demokrasi itu sendiri dapat terselenggarakan dengan semestinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta mengkaji berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait dengan tantangan demokrasi pancasila di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi pancasila menghadapi tantangan di era digital dan selanjutnya perlu adanya solusi untuk mengatasi tantangan demokrasi pancasila di era digital. Dalam atikel ini juga memaparkan keterlibatan pendidikan dalam penguatan demokrasi pancasila di era digital.

Kata kunci: Demokrasi Pancasila, Digital, Pendidikan

1. LATAR BELAKANG

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang lahir pada 1 Juni 1945. Pancasila tidak hanya menjadi sebuah lima dasar ideologi negara yang harus dihafalkan oleh rakyat Indonesia tetapi juga harus diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila merupakan sebuah cakupan representative dari nilai-nilai luhur yang menjadi identitas asli bangsa Indonesia.

Di era globalisasi dan khususnya digitalisasi yang mereka kemajuan teknologi untuk mengakses dan menerima informasi yang sangat cepat ini perlu diwaspadai dan dimaknai dengan baik oleh rakyat Indonesia jika rakyat Indonesia tidak mampu memproteksi diri dengan

baik dari dampak negatif adanya percepatan kemajuan teknologi, maka hal tersebut akan menjadi suatu ancaman masif bagi negara. Dalam menghadapi dan menangkal hal tersebut Pancasila hadir membawa nilai-nilai dalam lima dasarnya yang menjadi panduan dan rujukan rakyat Indonesia dalam bermoral dan beretika di era globalisasi dan khususnya digitalisasi. oleh karena itu menjadi sebuah keharusan bagi rakyat Indonesia dalam mempelajari dan menerapkan Pancasila dalam diri mereka sendiri untuk menjadi tameng dari dampak negatif dalam kemajuan zaman.

2. KAJIAN TEORITIS

Demokrasi berasal dari dua kata yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein/kratein* yang berarti kedulatan atau kekuasaan. Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam negara demokrasi, masyarakat atau komunitas berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Demokrasi digital merupakan sebuah konsep yang dapat menumbuhkan deliberasi masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam suatu tata kelola pemerintahan, hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Tsagarousianou (2000) dalam (Vandito et al., 2023) bahwa tipe serta karakteristik dari demokrasi digital adalah Keterbukaan informasi, Deliberasi politik masyarakat, Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan.

Demokrasi Pancasila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Secara umum Demokrasi Pancasila merupakan sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Konsep Pemahaman Demokrasi Pancasila ini jelas berasal dari asas-asas yang terkandung dalam Pancasila (Purnomo, 2020).

Digitalisasi merupakan proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengoprasian otomatis dan sistem terkomputerisasi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Technologia* menurut Webster Dictionary berarti *systematic treatment* atau penanganan sesuatu secara sistematis, sedangkan *techne* sebagai dasar kata teknologi berarti *skill* atau keahlian, keterampilan dan ilmu (Ramadhani, yasifa, and rizky 2024). Digitalisasi adalah proses konversi atau transformasi informasi atau data dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Dalam konteks teknologi informasi, digitalisasi merujuk pada proses mengubah dokumen, gambar, suara, dan data lainnya menjadi format digital yang dapat diakses dan digunakan melalui komputer atau perangkat elektronik lainnya. Digitalisasi juga merujuk pada perubahan dalam cara berinteraksi, organisasi, atau bahkan berpolitik sekalipun teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan memaparkan bagaimana di era digital pada saat ini, demokrasi pancasila dihadapkan tantangan. Dengan adanya tantangan dihadapi, perlunya solusi untuk mengatasi segala tantangan demokrasi pancasila di era digital ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian tentang tantangan demokrasi pancasila di era digital menggunakan metode penelitian pustaka atau *library research*. Dalam metode ini, penulis menitikberatkan pada analisis terhadap data primer dan sekunder yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan deskriptif-analitik dipilih untuk menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan, serta untuk menganalisis permasalahan yang ada serta menemukan korelasi antara berbagai elemen yang terlibat. Sumber data primer berupa buku-buku yang secara langsung terkait dengan topik, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai buku, media, dan jurnal yang relevan dengan politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap demokrasi pancasila di era digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Demokrasi Pancasila

Demokrasi berasal dari dua kata yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/cratein* yang berarti memerintah atau pemerintah. Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam negara demokrasi, masyarakat atau komunitas berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Konsep demokrasi tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Demokrasi memerlukan hukum untuk mengatur negara. Sedangkan pancasila adalah ideology dan pandangan hidup masyarakat (Priatna & Supandi, 2024). Dengan kata lain Demokrasi Pancasila diartikan sebagai sistem demokrasi yang berpegang pada prinsip-prinsip yang ada dalam pancasila dengan menggunakan hukum untuk mengatur negara yang berdemokrasi. Aturan hukum yang dibuat dalam mengatur negara harus sesuai dan sejalan dengan tujuan serta pandangan hidup bangsa sehingga sistem demokrasi yang baik dan sesuai dengan konteks demokrasi itu sendiri dapat terselenggarakan dengan semestinya. Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pengertian pancasila sebagai dasar negara, selain itu pancasila sebagai organisasi kehidupan berbangsa mengandung nilai-nilai luhur yang bersumber dari tokoh-tokoh bangsa. Berdasarkan nilai fundamental masyarakat beranggapan bahwa ideology tersebut akan terus digunakan masyarakat untuk mengutamakan nilai tersebut dan menganggap pancasila sebagai identitas nasional Indonesia.

Dalam ruang lingkup Demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat merupakan dasar utama yang ditegaskan. Asas ini menegaskan bahwa kekuasaan politik terdapat pada rakyat, dan rakyat berhak memilih pemimpin mereka melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Demokrasi, selain mempunyai sifat yang menyeluruh, yaitu diterima di seluruh dunia bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang unik serta khusus dari masing-masing negara. Karakteristik unik demokrasi di setiap negara biasanya dipengaruhi oleh ideologi yang dianut. Demokrasi kita selain memiliki sifat yang menyeluruh, juga memiliki karakter unik yang sejalan dengan budaya bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang ditanamkan pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita miliki harus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bambang Trisno et al., 2024). Sejalan dengan itu demokrasi Pancasila menjadi demokrasi bangsa Indonesia yang mengadung nilai-nilai fundamental dalam Pancasila dan kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga Pancasila menjadi ciri khas dan pembeda dalam demokrasi Indonesia dengan negara-negara lainnya yang menerapkan sistem demokrasi. Dengan masyarakat Indonesia yang multikultur Pancasila berperan sebagai pemersatu dalam sistem demokrasi, sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat harus memiliki tujuan yang sama dalam masyarakat yang beragam.

Elemen utama demokrasi yang berlandaskan Pancasila adalah prinsip musyawarah. Pokok-pokok ini berasal dari sila keempat Pancasila, yang pada intinya adalah mencapai "*win-win solution*". Yang memiliki makna bahwa, dengan menggunakan prinsip musyawarah, diharapkan semua pihak yang memiliki perbedaan pendapat merasa puas. Dalam hal ini, konsep demokrasi musyawarah versi Indonesia merupakan salah satu bentuk teori demokrasi consensus. Jadi konsep Demokrasi Pancasila sendiri adalah sistem Pemerintahan dengan pemberian kebebasan kepada rakyatnya dengan mengedepankan dan berpedoman pada nilai-nilai fundamental Pancasila.

Demokrasi dan Digitalisasi

Dalam era digital yang semakin maju, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma politik di seluruh dunia, termasuk di negara-negara berkembang. Akses yang semakin meluas terhadap internet, media sosial, dan teknologi lainnya telah mengubah cara warga negara berpartisipasi dalam proses politik, memberikan ruang untuk ekspresi, dan memperluas akses informasi. Dalam konteks ini tidak mengherankan jika ada banyak definisi tentang demokrasi digital. Bagi beberapa orang mendefinisikan merujuk pada penggunaan alat digital untuk menyediakan informasi dan meningkatkan transparansi. Bagi sebagian orang juga

menggambarkan demokrasi digital merupakan cara dimana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat memperluas dan memperdalam partisipasi. Sementara yang lain berbicara tentang mendorong pemberdayaan dengan memungkinkan warga untuk membuat keputusan secara langsung melalui alat Online yang didefinisikan sebagai “praktek demokrasi menggunakan alat dan teknologi digital”.

Dalam literatur, tidak ada definisi literasi digital yang disepakati. Sebagian ini karena istilah tumpang tindih dengan konsep kewarganegaraan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, tata kelola, e-pemerintahan, masyarakat sipil dan ranah public. Namun kita dapat membuat perbedaan antara definisi secara minimalis dan maksimalis dari demokrasi digital. Yang pertama berfokus pada memberikan warga negara akses ke informasi pemerintah dan memungkinkan mereka berinteraksi dengan pemerintah melalui *platform online*. Kemudian yang selanjutnya ialah membayangkan peran yang lebih partisipatif warga, memungkinkan mereka berkolaborasi dengan pejabat pemerintah serta membuat keputusan sendiri tentang bagaimana mereka dan komunitas lokal mereka dikelola. Digital menawarkan kemungkinan baru untuk mewujudkan demokrasi dari bawah ke atas. Ada empat area utama dalam transformasi demokrasi yaitu Peran pemerintah dan warga Negara, ruang public, hubungan antara partisipasi dan representasi, dan isu dominasi dan hak asasi (Asep A. Sahid Gatara, 2016).

Demokrasi digital merupakan sebuah konsep yang dapat menumbuhkan deliberasi masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam suatu tata kelola pemerintahan, hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Tsagarousianou (2000) bahwa tipe serta karakteristik dari demokrasi digital adalah 1. Keterbukaan informasi; 2. Deliberasi politik masyarakat; 3. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan dalam (Vandito et al., 2023). Pembangunan demokrasi di era digital merupakan fenomena yang menghadirkan dinamika baru dalam proses politik global. Negara-negara berkembang, dengan akses yang semakin meluas terhadap teknologi informasi dan komunikasi, berada di garis depan perubahan ini. Mereka tidak hanya dihadapkan pada peluang untuk meningkatkan partisipasi politik dan transparansi pemerintahan, tetapi juga dihadapkan pada tantangan baru yang memerlukan adaptasi yang cepat.

Pembangunan demokrasi di era digital menandai transisi signifikan dalam politik global, khususnya bagi negara-negara berkembang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan warga negara untuk terlibat secara langsung dalam proses politik, memperluas ruang partisipasi, dan mendukung transparansi pemerintahan. Namun, dampak teknologi digital tidaklah seragam, dan negara-negara berkembang dihadapkan pada

tantangan yang kompleks. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang dinamika antara teknologi digital dan pembangunan demokrasi menjadi esensial. Dengan semakin meluasnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial, masyarakat di negara-negara berkembang memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi politik dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan negara. Dalam era di mana internet dan media sosial memainkan peran yang semakin dominan dalam menyebarkan informasi dan memfasilitasi interaksi antarwarga negara, pemahaman tentang bagaimana dinamika ini memengaruhi pembangunan demokrasi menjadi sangat penting. Tantangan seperti penyebaran berita palsu, di mana informasi yang salah disebar dengan cepat dan luas, serta polarisasi politik yang semakin meningkat, mengancam keintegritasan proses demokrasi (Girsang, 2024).

Tantangan dan Peluang Demokrasi Pancasila di Era Digital

Demokrasi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era digital. Kemajuan teknologi informasi membawa perubahan yang signifikan dalam proses demokratisasi, baik dalam hal partisipasi masyarakat maupun penyebaran informasi. Meskipun era digital memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam isu-isu publik, namun kemudahan akses informasi juga memicu risiko penyebaran berita hoaks dan konten yang dapat merusak persatuan bangsa.

Pada zaman digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik dan sosial. Sistem demokrasi pun tidak luput dari pengaruhnya. Era digital juga menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks yang dapat menghambat jalannya demokrasi. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di era digital:

Polarisasi Opini Publik

Dengan adanya *platform* digital yang memungkinkan individu untuk memilih informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri (*filter bubble*), polarisasi opini publik semakin meningkat. Media sosial dan platform digital dapat memperkuat polarisasi opini publik dengan memungkinkan individu untuk terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan terpecahnya masyarakat menjadi kelompok, dimana warga cenderung mengelompokkan diri mereka ke dalam kelompok-kelompok dengan pandangan serupa, yang kemudian memperkuat persepsi dan pandangan mereka yang semakin ekstrem dan sulit untuk mencapai kesepakatan bersama.

Platform-media sosial seringkali menjadi lingkungan di mana polarisasi politik diperkuat. Orang cenderung bergabung dengan kelompok-kelompok online yang memiliki pandangan politik serupa dengan mereka, dan seringkali terpapar pada informasi yang hanya memperkuat keyakinan mereka sendiri. Hal ini dapat menghambat dialog dan kompromi politik yang penting untuk fungsi demokrasi yang sehat (Ningtyas, 2023).

Penurunan Kualitas Diskusi Publik

Kualitas diskusi publik juga mengalami penurunan. Dengan adanya media sosial, diskusi sering kali menjadi emosional dan tidak berbasis pada fakta. Hal ini dapat mengarah pada konflik yang tidak produktif dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam proses demokrasi. Pancasila sebagai dasar negara mengharuskan adanya dialog yang sehat dan saling menghormati, yang kini semakin sulit dicapai.

Risiko Privasi Data

Penggunaan teknologi digital di era modern menawarkan berbagai kemudahan, tetapi juga membawa risiko signifikan terkait privasi data. Pada tahun 2019, KPU harus melindungi data berjumlah 192.828.520 warga negara Indonesia tercatat sebagai pemilih dan data yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, Pada tahun 2019 untuk pertama kalinya Indonesia memiliki desain pemilu yang dilakukam serentak dengan terpilihnya lima calon dari lima pemilu sekaligus, yakni pemilihan presiden (Pilpres), DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh para penjahat teknologi informasi untuk melakukan penyitaan dan data pribadi secara ilegal, sehingga KPU harus memberikan perhatian khusus terhadap data pribadi pada saat pendataan, pada saat dan pengambilan data pemilu. Saat masa pemilu berakhir, aliran data KPU yang muncul pada bulan Mei 2020 akan memiliki 2,3 juta data DPT pemilu, dari DPT tahun 2014 khususnya di Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY).

Dalam konteks Pancasila, yang menjadi dasar negara Indonesia, tantangan ini memiliki dampak yang mendalam terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi. Ketika informasi pribadi individu dapat dieksploitasi untuk kepentingan politik atau komersial, kita melihat ancaman terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi.

Penggunaan teknologi digital meningkatkan risiko privasi data, di mana informasi pribadi individu dapat dieksploitasi untuk kepentingan politik. Penggunaan data pribadi untuk kepentingan politik atau komersial telah menjadi isu sentral dalam era digital. Risiko privasi

data meningkat dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pribadi. Ini dapat mempengaruhi hak individu terhadap privasi dan dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis, seperti penargetan iklan yang tidak relevan atau manipulasi politik. Hal ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Penyebaran Berita Palsu (Hoaks)

Penyebaran berita palsu atau disinformasi merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh demokrasi Pancasila di era digital. Dengan kemudahan akses informasi melalui media sosial dan platform daring, berita hoaks dapat tersebar dengan cepat dan masif, menjangkau para pihak yang lebih luas dalam waktu singkat. Dalam konteks ini, disinformasi bukan hanya menjadi masalah individual, tetapi juga menjadi ancaman terhadap integritas proses demokrasi itu sendiri. Berita palsu dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, mendiskreditkan lawan politik, dan bahkan memicu kerusuhan sosial. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diterima dan mempengaruhi proses demokrasi.

Organisasi Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Parludem) sepanjang 2023 menemukan lebih dari 1.100 informasi hoaks mengenai pemilihan umum. Ditemukan sebanyak 80% nya terkait dengan pemilihan presiden dan sisanya terkait pemilu secara umum (Anatasya Andriarti et al., 2024). Maraknya hoaks ini jelas menjadi tantangan dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Jurnalis dan pengecek fakta yang bertanggung jawab harus berusaha untuk memperjelas informasi di masyarakat. Mereka melawan hoaks melalui pembuatan konten cek fakta dan mengadakan pelatihan literasi berita serta metode pengecekan.

Solusi Mengatasi Tantangan Demokrasi Pancasila di Era Digital

Dalam melanjutkan pembahasan, perlu dipahami bahwa solusi untuk mengatasi krisis demokrasi di era digital tidak hanya terbatas pada tindakan individual atau regulasi pemerintah semata. Peran aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk media, lembaga akademis, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan berdaya. Adapun Upaya dan pemberian solusi yang dapat dilakukan terhadap tantangan demokrasi yang terjadi di Indonesia ialah:

1. Meningkatkan literasi digital.

Hoaks digunakan untuk melakukan kontruksi sosial dengan cara memfarming peristiwa tertentu. Demokrasi Indonesia menjadi taruhannya, bila hoaks dibiarkan begitu saja. Hoaks

dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan dan berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi. Untuk mengurangi adanya hoaks dibutuhkan literasi digital.

Jawa Barat merupakan provinsi terpadat di Indonesia. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki tingkat kerawanan tinggi berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahun 2024. Studi menemukan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Jawa Barat adalah provinsi kedua di Indonesia yang paling banyak menaerikan informaasi palsu yang mengandung unsur kebencian.

Studi menemukan perempuan paling aktif di media sosial. Kurangnya literasi dan kecenderungan perempuan lebih cepat memproses hoaks secara psikologis, membuat perempuan lebih rentan terkena hoaks (Anatasya Andriarti et al., 2024). Literasi digital ini dikenalkan teknik baru dalam menghadapi hoaks yaitu Debunking, teknik ini bertujuan untuk membuat warga lebih kebal terhadap hoaks berulang. Dengan memperkenalkan hoaks secara repetitif, metode, modus,,dan narasi hoaks yang berkembang khususnya hoaks pemilu. Selama ini konten cek fakta yang beredar adalah konten debunking yang mengkalifikasi satu hoaks yag beredar dan menyampaikan hasil penelusuran kebenaran (Caroline Paskarina et al., 2017)

2. Regulasi Yang Kuat

Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk memastikan bahwa algoritma dan praktik bisnis tidak mendukung penyebaran disinformasi atau memperburuk polarisasi. Aturan-aturan ini harus mencapai keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan dari ancaman online seperti ujaran kebencian dan eksploitasi data.

3. Memperkuat Institusi Demokrasi

Penting untuk memodernisasi sistem pemilu, menjamin keamanan dan integritas pemungutan suara elektronik, dan memperkuat institusi pengawasan untuk mengatasi tantangan digital. Dengan cara ini, teknologi dapat membantu memperdalam dan bukan melemahkan keterlibatan demokrasi.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi tentang bagaimana keputusan diambil baik di pemerintahan maupun perusahaan teknologi. Transparansi mengenai

penggunaan algoritme, kebijakan moderasi konten, dan cara data pribadi digunakan dan dilindungi adalah hal yang penting.

5. Pendidikan Kewarganegaraan Demokratis

Penting untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan demokratis dan pendidikan era digital yang baik kepada masyarakat luas. Hal ini guna mendorong pemahaman masyarakat mengenai kebenaran konsep dan sistem demokrasi yang seharusnya berjalan (Andriani, 2022).

Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat memahami nilai-nilai dasar demokrasi dan belajar memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk memperkuat demokrasi. Teknologi bukan hanya membantu menyebarkan informasi, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam dialog dan proses demokratis. Selain itu, penting bagi kita untuk memperkuat hak asasi manusia dan kebebasan berbicara di dunia digital. Dalam konteks ini, penegakan terhadap kebebasan berekspresi serta akses terhadap informasi yang akurat harus ditentang, agar masyarakat dapat merasa aman dalam mengekspresikan pandangan mereka. Hak untuk berbicara dan berpendapat secara terbuka di ruang digital perlu dihargai dan dilindungi, dan masyarakat perlu didorong untuk menggunakan hak-hak ini dengan aktif dan bijaksana.

Di samping itu, perlu juga ada dorongan berkelanjutan untuk inovasi dan pembaruan dalam hukum serta regulasi terkait teknologi dan informasi. Hal ini penting agar sistem hukum kita tetap selaras dengan perkembangan teknologi yang cepat, sekaligus dapat menghadirkan perlindungan yang cukup bagi hak-hak individu dan menjamin terjaganya nilai-nilai demokrasi. Dalam era digital ini, aturan hukum yang relevan menjadi kunci untuk melindungi privasi, mencegah penyalahgunaan data, dan menindak pelanggaran yang mungkin muncul. Hukum harus memiliki kapasitas untuk merespons dinamika baru, agar perkembangan teknologi tidak mengorbankan hak-hak fundamental dan prinsip-prinsip demokrasi.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara kolektif, kita berharap bahwa krisis demokrasi yang timbul akibat pesatnya perkembangan teknologi digital dapat diatasi. Harapan utamanya adalah agar demokrasi dapat terus tumbuh dan bertahan di tengah perubahan besar yang dibawa oleh era digital. Langkah-langkah ini membutuhkan kerja sama lintas sektor, komitmen jangka panjang, dan inovasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan individu. Dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat, aman, dan demokratis, yang akan bermanfaat bagi seluruh warga dunia.

Keterlibatan Pendidikan dalam penguatan demokrasi Pancasila di era digital

Keterlibatan pendidikan dalam penguatan Demokrasi Pancasila di era digital merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap relevan dan diterapkan dalam konteks yang modern. Pendidikan berperan sebagai fondasi dalam membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip Pancasila. Dalam era digital, di mana informasi dapat dijangkau secara praktis dan cepat, pendidikan harus mampu membekali individu dengan keterampilan kritis untuk menyaring informasi dan memahami konteks sosial-politik.

Proses penguatan demokrasi sudah terintegrasi dalam mata pelajaran PPKn, namun konsep pendidikan ini seringkali hanya berhenti pada penekanan teoritis, hal ini terjadi karena modul pembelajaran yang monoton hanya terfokus pada satu arah dalam hal ini guru sebagai pusat pembelajaran menggunakan metode ceramah yang pasif. Hal ini memperlambat keterampilan kritis dan partisipasi siswa yang menjadi esensi demokrasi titik namun demikian, hal ini bukan serta menjadi kesalahan guru. Tetapi adanya keterbatasan pada kurikulum titik untuk hal tersebut pengimplementasian model pembelajaran ke dalam media ekstrakurikuler dan kegiatan pemilihan ketua OSIS (Fadhila Az Zahra & Dea Nabila, 2024).

Menurut Gaffar (2007:15) dalam (Sa, 2021) materi PPKn mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai, ketiganya dapat dicapai dengan adanya perbaikan strategi pembelajaran. Menurut chollisin (2016:120) dalam (Sa, 2021) karakter warga negara yang demokrasi dalam pandangan demokrasi Pancasila adalah yang turut berpartisipasi aktif dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan. Maka demikian. Dalam hal ini guru memegang peranan penting keterbukaan dalam penyampaian argumentasi, kritik dan saran pada saat pembelajaran berlangsung dapat distimulus karakter tersebut hadir dalam diri siswa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila, di mana kedaulatan rakyat menjadi prinsip utama. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, dan musyawarah menjadi elemen kunci untuk mencapai kesepakatan.

Pada era digitalisasi, Perkembangan dalam teknologi informasi Menimbulkan dampak signifikan dalam proses demokratisasi. Masyarakat kini memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan partisipasi politik, tetapi juga menghadapi tantangan seperti penyebaran berita

palsu, polarisasi opini publik, penurunan kualitas diskusi, dan risiko privasi data. Penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial dapat memicu disinformasi yang merusak integritas demokrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, artikel mengusulkan beberapa solusi, termasuk meningkatkan literasi digital untuk membantu masyarakat mengenali berita palsu, regulasi yang kuat untuk mengatur algoritma dan praktik bisnis agar tidak mendukung disinformasi, memperkuat institusi demokrasi dengan modernisasi sistem pemilu dan pengawasan, Transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintah dan penggunaan data, pendidikan kewarganegaraan demokratis untuk memahami nilai-nilai demokrasi dan memanfaatkan teknologi secara positif.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Demokrasi Pancasila dapat bertahan dan berkembang meskipun dihadapkan pada tantangan era digital. Pentingnya pendidikan karakter dan literasi digital ditekankan sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ini. Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengenali informasi yang akurat dan terlibat secara konstruktif dalam proses demokrasi. Selain itu, regulasi yang kuat dan transparansi dalam pengelolaan data serta keputusan politik juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, harapannya adalah agar Demokrasi Pancasila dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan yang dihadirkan oleh teknologi digital, sehingga tetap relevan dan efektif dalam memajukan bangsa Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiansyah, Faturrahman.(2023). “Penerapan Pancasila Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang.” Kompasiana 816–28.
- Anatasya Andriarti, Dita Nurmadewi, Suharyati, Rindu Dwi Yulianti, Richard Ariyanto, & Rangga Fadhil M. S. (2024). Literasi Digital Melawan Hoaks Pemilu 2024. *Community Development Journal*, Vol. 5 No.(1), 838–844.
- Andriani, A. D. (2022). Demokrasi Damai Di Era Digital. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(1). <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1663>
- Aprilyautami, Aprilyautami, Viola Safitri, Azrina Febriyani Nasution, and Karin Vazira. (2024). “Demokrasi Pancasila.” *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2(1):548–58. doi: 10.57235/ijedr.v2i1.1824
- Asep A. Sahid Gatara. (2016). Demokrasi Nithing Kritik Terhadap Konsep Dan Praktek Cyberdemocracy. *Dialog Kebijakan Publik*, 22(October), 1–11.

- Bambang Trisno, Oti Aprilia. Oriza Latifa, Deyaninda Safira, T. A. P. (2024). Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, Vol.3, 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1548>
- Caroline Paskarina, Rina Hermawati, N. (2017). EDUKASI ANTI- HOAX DALAM PEMILU MELALUI METODE DEBUNKING. *Jurnal Articiel*, 1–4.
- E. C, Fakhry Amin, Setiyo Utomo, M.Aziz Zaelani, M. Taufik Rusydi, Kristina Roseven, Rustan, Minto Santoso, Fendi Hendriawan, Balthsar Watunglawar, Dionisius Heckie Puspoko Jati, Pajar Pahrudin, Riana Susmayanti. (2024). PANCASILA DALAM PENDIDIKAN TINGGI Pilar Kebangsaan di Era Digital dan Kecerdasan Buatan (A. Iftitah (ed.); Pertama). PT SADA KURNIA PUSTAKA. https://books.google.com/books/about/Pancasila_dalam_Pendidikan_Tinggi.html?id=JNErEQAAQBAJ
- Fadhila Az Zahra, & Dea Nabila. (2024). Pendidikan Demokrasi Sebagai Alat Penguat Kebhinekaan Dan Toleransi Di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 157–168. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.259>
- Girsang, T. (2024). Pembangunan Demokrasi Di Era Digital Tantangan Dan Peluang Bagi Negara-Negara Berkembang. *Tugas Mahasiswa Fisipol*, 1–11. <https://coursework.uma.ac.id/index.php/fisipol/article/view/424>
- Jannah, Alfia Miftakhul, Irada Haira Arni, Bunga Fatwa, Husnun Hanifah, Fandi Akhmad, Universitas Ahmad, and Dahlan Yogyakarta. 2021. “Pendidikan Di Indonesia.” 1(November 2021):138–50.
- Kasmin. (2024). “URGENSI PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA DIGITALISASI THE URGENCY OF STRENGTHENING PANCASILA VALUES IN THE DIGITALIZATION ERA.” (September):5028–40.
- Khresnanda, Elvizto Juan, and Fatma Ulfatun Najicha.(2023). “Penerapan Nilai Pancasila Dalam Karakter Pemuda Indonesia Di Era Digital.” *UNiversitas Sebelas Maret* (December):1–15.
- Mazurkiewicz, Piotr. (2009). “Democracy and the Church.” *Civitas. Studia z Filozofii Polityki* 11(1):161–85. doi: 10.35757/civ.2009.11.08.
- Ningtyas, A. (2023). Pembangunan Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Prospek. *Literacy Notes*, 1–11. <https://litrnote.com/index.php/ln/article/view/81>
- Priatna, I. A., & Supandi, G. (2024). Tantangan Dan Peluang Karir Di Era Digital. *SEPAKAT Sesi Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(1), 7–11. <https://doi.org/10.56371/sepakat.v4i1.267>
- Purnomo, Bagus Andi. (2020). *PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI*. Cetakan Pe. edited by Komang Agus Widiantera. Bali: YAYASAN MERTA JATI WIDYA MANDALA.
- Ramadhani, Siti, Aufa yasifa, and Ridho rizky. 2024. “Digitalisasi Administrasi Di Mi.” 7(2):65–74.

- Rohim, Miftahul, Linda Rahmawati, Arkan Raihan, and Saepul Rizki.(2023). “Demokrasi Pancasila: Konsep Dan Implementasi Di Indonesia.” *Advanced In Social Humanities Research* 1(5):664.
- Sa, S. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Seyegan Sejarah Artikel. *Journal Student UNY*, 10(04), 432–444.
- Vandito, R. L., Paramesti, A., Aminudin, M. A. V., & Wulandari, L. (2023). Manifestasi Konsep Demokrasi Digital Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Jakarta: Studi Kasus Pemanfaatan Platform “Jakarta Kini (JAKI)” Sebagai Wadah Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 1–16.
<https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing>
- Wattimena, R. A. . (2016). *Demokrasi Dasar Filosofis dan Tantangannya* (Victi (ed.); Edisi Elek). PT KANISUS.
<https://books.google.com/books/about/Demokrasi.html?id=u7njEAAAQBAJ>